

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Reformasi di bidang kesehatan telah menetapkan Visi Pembangunan Kesehatan yang dinyatakan dalam motto Indonesia Sehat 2010. Visi yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan tersebut adalah masyarakat, bangsa, dan negara yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Depkes,1999).

Untuk dapat mewujudkan Visi INDONESIA SEHAT 2010 dan salah satu tanggung jawab sektor kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau oleh masyarakat secara ekonomis dan non ekonomis dan tersedianya pelayanan kesehatan atas dasar rujukan yang diberikan. Namun demikian, penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak semata-mata berada di tangan pemerintah melainkan mengikutsertakan sebesar-besarnya peran aktif segenap anggota masyarakat dan potensi swasta (Depkes,1999).

Strategi yang dipergunakan dalam rangka menyelenggarakan misi tersebut untuk mencapai Indonesia Sehat 2010 adalah Profesionalisme dilaksanakan melalui penerapan kemajuan ilmu dan teknologi, serta melalui penerapan nilai-nilai moral dan etika. Untuk terselenggaranya pelayanan yang bermutu perlu

didukung oleh penerapan berbagai kemajuan ilmu dan teknologi kesehatan. Secara terus menerus ditingkatkan profesionalisme para petugas kesehatan serta profesionalisme di bidang manajemen pelayanan kesehatan.

Salah satu misi pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010 adalah membuat program sumber daya kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya kesehatan serta efektivitas dan efisiensi penggunaannya, dengan sasaran (a) terdapatnya kebijakan dan rencana pengembangan tenaga kesehatan masyarakat dan pemerintah di semua tingkat, (b) didayagunakannya tenaga kesehatan yang ada dan dikembangkannya pembinaan karier seluruh tenaga kesehatan, (c) berfungsinya pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan yang mengutamakan pengembangan peserta didik dalam rangka meningkatkan profesionalisme, (d) meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta sistem pembiayaan praupaya, (e) meningkatnya jumlah badan usaha yang menyelenggarakan sistem pembiayaan praupaya, (f) tersedianya jaringan pemberi pelayanan kesehatan paripurna yang bermutu baik pemerintah maupun swasta, sesuai dengan kebutuhan sistem pembiayaan praupaya, (g) meningkatnya jumlah unit jaringan pelayanan dokter keluarga sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan sistem pembiayaan praupaya yang menyelenggarakan pelayanan paripurna dan bermutu, (h) tersedianya peralatan kesehatan baik medik maupun non medik yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, dan (i) tersedianya perbekalan kesehatan yang memadai baik jenis maupun jumlahnya, yang sesuai